© Teknik Industri UNDIP
ISBN : 978-979-97571-4-2

Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ira Irawati[1], Zulfadly Urufi[1], dan Renato Everardo Isaias Rezza Resobeoen,
Agus Setiawan, Aryanto [2]
Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Nasional, Bandung
Kontak Person:
Ira Irawati
Zulfadly Urufi
Jl. PKH. Mustafa Alamat No. 23
Bandung, 40124
Telp: 022-7272215 ext 242, Fax: 022-7202892, E-mail: ira_irawati@yahoo.com

Abstrak

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut, walaupun dalam pengembangannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang antara lain disebabkan oleh kurang berkembangnya sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Perbandingan relatif tingkat daya saing antar kota kabupaten tersebut; berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu tingkat perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam, serta ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia; dilakukan untuk melihat sejauh mana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan untuk mengatasi persamalahan-permasalahan dalam pengembangan wilayahnya.

Kata kunci: *Pengembangan Wilayah, Daya Saing.*

1 PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan, di mana menurut Bruntland (1987) dalam Eko & Djoko (1993:3), pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia pada masa kini tanpa melupakan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini, kini sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan pengembangan kota dan kabupaten di Indonesia. Dalam menciptakan kota dan kabupaten yang berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu environment (ecology), economy (employment), equity, engagement and energy (Research Triangle Institute, 1996 dalam Eko & Djoko, 1999: 3). Berdasarkan World Bank Institute (2001), pencapaian

kota berkelanjutan dapat dirangkum ke dalam lingkup yang lebih mikro dengan keempat parameter yang terdiri atas *livability, competitiveness, bank ability, good governance and management*.

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia. dan membandingkannya dengan kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan hasil pemeringkatan daya saing daerah yang dilakukan oleh Armida S. Alisjahbana, dkk (2002) terhadap sembilan indikator utama yaitu, perekonomian daerah, keterbukaan, SDM, sistem keuangan, kelembagaan, infrastruktur dan SDA, governance dan kebijakan, IPTEK, dan Manajemen dan Mikro Ekonomi; secara keseluruhan menempati peringkat ke 18 dari 26 provinsi di Indonesia. Indikator dengan nilai tertinggi yaitu governance dan kebijakan (pada peringkat 9) dan terendah yaitu infrastruktur dan SDA (pada peringkat 23). Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat daya saing yang cukup rendah dibanding provinsi-provinsi di Indonesia.

Tingkat daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara ini, tentunya dibentuk oleh kemampuan daya saing kota-kota dan kabupaten-kabupatennya, di mana masing-masing kota dan kabupaten memiliki karakteristik perekonomian,infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang berbeda-beda. Pengukuran tingkat daya saing terhadap 3 (tiga) variabel ini selanjutnya dilihat keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kota kabupatennya dalam pengembangan kawasan strategis, struktur wilayah, sektor unggulan, dan visi, serta misi; untuk melihat sejauh mana keunggulan dari masing-masing kota kabupaten tersebut dapat mendukung arah kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan.

2 METODOLOGI

2.1 Variabel dan Indikator Tingkat Daya Saing Wilayah

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing setiap variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel perekonomian daerah, dengan sub variabel :
   - Nilai Tambah — X1 = PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
     X2 = Laju Pertumbuhan PDRB
     X3 = PDRB Per Kapita
   - Tabungan — X4 = Tabungan
     X5 = Laju Pertumbuhan Tabungan
   - Kinerja Sektoral — X6 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri
     X7 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa
     X8 = Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian
2. Variabel infrastruktur dan sumber daya alam (SDA), dengan sub variabel :
   - Modal Alamiah — Y1 = Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Lahan
     Y2 = Sumber Daya Air
     Y3 = Sumber Daya Hutan
   - Modal Fisik — Y4 = Luas Wilayah Perkotaan
     Y5 = Panjang Jalan per Luas Wilayah Wilayah Perkotaan
     Y6 = Kualitas Jalan Raya
     Y7 = Produksi Listrik
     Y8 = Fasilitas Telepon per Kapita

3. Variabel sumber daya manusia (SDM), dengan sub variabel :
   - Ketenagakerjaan : angka ketergantungan, angkatan kerja, prosentase angkatan kerja, jumlah penduduk usia produktif terhadap total penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran;
   - Pendidikan : tingkat partisipasi siswa, dan rasio jumlah pengajar terhadap siswa.
     - Ketenagakerjaan X1 = Angka Ketergantungan
       X2 = Angkatan Kerja
       X3 = Persentase Angkatan Kerja
       X4 = Persentase Penduduk Usia Produktif terhadap Total Penduduk
       X5 = Jumlah Penduduk Yang Bekerja
       X6 = Pengangguran
     - Pendidikan X7 = Tingkat Partisipasi Siswa
       X8 = Rasio Jumlah Pengajar Terhadap Siswa

Ketiga variabel tingkat daya saing dalam penelitian ini merupakan perbadingan dari beberapa variabel yang dikemukakan oleh para pakar, yaitu : Armida S., dkk (2002), Michael Porter, World Economic Forum (WEF), Institute of Management Development (IMD), Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI), Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), The Bulgarian Competitiveness Initiative, Kenyon (Western Australia Planning Commision), Fanstein, Thomas (www.beaconhill.org), Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia dan FE UNPAD, World Bank Institute.

2.2 Metodologi

Pengukuran tingkat daya saing di Propinsi Sulawesi Utara ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan dengan :
   - Survey Sekunder, untuk memperoleh data terkait nilai dari sub variable-sub variable yang telah ditetapkan
   - Survey Primer, dengan maksud untuk mengetahui pendapat para ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya, yang nantinya akan memberikan bobot atas perbandingan relatif antar sub variabel untuk digunakan dalam AHP. Adapun para ahli yang menjadi responden adalah ahli yang menguasai di bidangnya, tokoh masyarakat yang memahami wilayahnya, pengusaha daerah, LSM, dan militer. Para ahli tersebut adalah ahli ekonomi, perencanaan wilayah dan kota, pendidikan, ketenagakerjaan, pertanahan, infrastruktur, ahli perindustrian dan perdagangan, tokoh masyarakat yang dianggap memahami wilayah. Jumlah respondean atau ahli untuk masing-masing variabel adalah 10 orang.

2. Tahap Analisis

   Analisis untuk :
   a. Mengidentifikasi bobot prioritas atau tingkat kepentingan relatif antar indikator dalam satu variabel, untuk masing-masing variabel.

      Metode yang digunakan dalam identifikasi ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), di mana metode tersebut digunakan sampai dengan penentuan hirarki kriteria atau membandingkan tingkat kepentingan relatif antara kriteria. Adapun kriteria-kriteria tersebut, dalam penelitian ini disebut dengan indikator.

      Sebelum data-data setiap indikator diolah dengan AHP, karena keberagaman satuan dari setiap indikator, maka terlebih dahulu data tersebut di-“standarisasi” untuk memperoleh distribusi data yang normal dan dapat dibandingkan antara satu sama lain. Beberapa indikator yang memiliki makna sebaliknya, artinya makin besar nilai indikator tersebut maka makin buruk

kondisi dari indikator tersebut (yaitu : indikator inflasi, angka ketergantungan, dan jumlah pengangguran), dilakukan perhitungan kebalikan sebelum data tersebut distandarisasi, sehingga tidak menghasilkan bobot prioritas yang salah.

b. Mengukur tingkat daya saing antar kabupaten/kota berdasarkan nilai variabel perekonomian, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia; dengan melakukan perkalian antara nilai dari indikator ter-standarisasi dengan bobot prioritas masing-masing indikator dalam setiap variabel. Selanjutnya dari nilai indikator terbobot[1] inilah diperoleh :
   - peringkat daya saing antar seluruh kabupaten/kota
   - perbedaan peringkat daya saing antara kabupaten/kota di daratan dengan kabupaten/kota di wilayah kepulauan[2], di mana perbandingan ini dilihat untuk melihat apakah terdapat kabupaten/kota di wilayah daratan memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota di wilayah kepulauan.

c. Mengidentifikasi kesesuaian antara indikator unggulan setiap variabel di setiap kabupaten/kota dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Identifikasi yang dimaksud adalah kesesuaian antara :
   - Sektor unggulan yang ditetapkan di setiap kabupaten/kota masing-masing, dengan indikator unggulan dalam setiap variabel daya saing di setiap kabupaten/kota masing-masing. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat, apakah indikator yang unggul dapat memperkuat sektor unggulan yang telah ditetapkan. Indikator unggulan di setiap kabupaten/kota adalah nilai indikator terbobot tertinggi (nilai indikator yang telah dikalikan bobot prioritas dengan nilai tertinggi) yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota, dan merupakan indikator daya saing terunggul untuk setiap kabupaten/kota tersebut.
   - Peringkat daya saing kabupaten/kota dengan Sistem Perkotaan Nasional : PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal); serta berdasarkan pusat pengembangan perwilayahan.

[1] Nilai indikator terbobot = nilai indikator (indikator daya saing daerah setelah distandarisasi) x bobot prioritas
[2] Kabupaten/kota yang terletak di daratan adalah kabupaten/kota yang terletak di Pulau Selawesi bagian tenggara, adapun kabupaten/kota yang terletak di kepulauan adalah kabupaten/kota yang letaknya terpisah dari Pulau Sulawesi bagian tenggara.

3 PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.1 Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil AHP atas kuesioner yang dibagikan kepada pada ahli dan nara sumber, maka berikut ini bobot prioritas dari masing-masing indickor yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Bobot Prioritas Indikator-Indikator Perekonomian Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator-Indikator Perekonomian Daerah	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
1	2	3
Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian (X8)	0,211	1
Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Jasa (X7)	0,174	2
Laju Pertumbuhan PDRB (X2)	0,163	3
Laju Pertumbuhan Produktivitas Sektor Industri (X6)	0,140	4
Laju Pertumbuhan Tabungan (X5)	0,114	5
PDRB per kapita (X3)	0,070	6
Tabungan (X4)	0,053	7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1)	0,051	8

Sumber: Hasil Analisis, 2007.

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten / kota untuk variabel perekonomian daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Peringkat	**Kabupaten/Kota**	**Nilai Indikator Terbobot**								**Jumlah Indikator Terbobot**
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kabupaten Buton	0,024	0.099	0,046	0,162[1]	0,096	0,119	0,023	0,147[2]	0,716
II	Kabupaten Bombana	0,009	0,157[1]	0,073	0,041	0,049	0,048	0,155[2]	0,157[1]	0,689
III	Kabupaten Konawe	0,038	0,088	0,040	0,094	0,081	0,109[2]	0,080	0,130[1]	0,659
IV	Kabupaten Konawe Selatan	0,021	0,118	0,043	0,094	0,081	0,127[1]	0,063	0,104	0,651
V	Kota Kendari	0,044	0,118[2]	0,120[2]	0,059	0,059	0,068	0,088	0,036	0,592
VI	Kota Bau-Bau	0,015	0,109[2]	0,053	0,052	0,162[1]	0,099	0,029	0,045	0,264
VII	Kabupaten Kolaka Utara	0,013	0,013[2]	0,159[1]	0,043	0,051	0,068	0,157[2]	0,029	0,533
VIII	Kabupaten Muna	0,036	0,066	0,064	0,090[1]	0,048	0,019	0,088[2]	0,045	0,456
IX	Kabupaten Wakatobi	0,003	0,046	0,019	0,056	0,048	0,157[1]	0,048	0,063[2]	0,441
X	Kabupaten Kolaka	0,049[2]	0,009	0,149[1]	0,041	0,049[2]	0,007	0,034	0,023	0,363
Jumlah										5,664

Sumber: Hasil Analisis, 2007.

Keterangan:
[1] = Indikator Tertinggi Pertama untuk kota/kabupaten tertentu
[2] = Indikator Tertinggi Kedua untuk kota/kabupaten tertentu

3.2 Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Infrasturktur dan Sumber Daya Alam

Bobot prioritas untuk masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Bobot Prioritas Indikator-Indikator Infrastruktur dan Sumber Daya Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator-Indikator Perekonomian Daerah	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
1	2	3
Panjang Jalan per luas wilayah (Y5)	0,165	1
Ketersediaan dan kualitas sumber daya lahan (Y1)	0,164	2
Sumber daya air (Y 2)	0,150	3
Sumber daya hutan (Y 3)	0,149	4
Kualitas jalan raya (Y 6)	0,115	5
Luas wilayah perkotaan (Y 4)	0,104	6
Produksi Listrik (Y 7)	0,089	7
Fasilitas telepon per kapita (Y 8)	0,049	8

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten / kota untuk variabel infrastruktur dan sumber daya alam dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Peringkat	**Kabupaten/Kota**	**Nilai Indikator Terbobot**								**Jumlah Indikator Terbobot**
		Y1	Y 2	Y	Y 4	Y 5	Y 6	Y 7	Y 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kabupaten Konawe	0,139[2]	0,063	0,148[1]	0,064	0,055	0,105	0,035	0,017	0,626
II	Kabupaten Kolaka	0,129[1]	0,039	0,107[2]	0,102	0,055	0,093	0,048	0,022	0,596
III	Kota Kendari	0,083	0,149[1]	0,030	0,028	0,055	0,097[2]	0,086	0,049	0,576
IV	Kota Bau-Bau	0,134[2]	0,133[2]	0,032	0,025	0,055	0,012	0,045	0,030	0,466
V	Kabupaten Muna	0,056	0,064	0,067[2]	0,037	0,055	0,101[1]	0,037	0,017	0,434
VI	Kabupaten Bombana	0,082[2]	0,034	0,076	0,033	0,127[1]	0,019	0,025	0,016	0,412
VII	Kabupaten Kolaka Utara	0,088[2]	0,035	0,059	0,094[1]	0,055	0,036	0,028	0,016	0,411
VIII	Kabupaten Buton	0,082[2]	0,065[2]	0,057	0,063	0,055	0,020	0,028	0,021	0,392
IX	Kabupaten Konawe Selatan	0,087[1]	0,065	0,076[2]	0,022	0,055	0,040	0,023	0,015	0,384
X	Kabupaten Wakatobi	0,001	0,065	0,030	0,017	0,164[2]	0,040[2]	0,028	0,015	0,332
Jumlah										4,630

Sumber: Hasil Analisis, 2007.

Keterangan:
[1] = Indikator Tertinggi Pertama untuk kota/kabupaten tertentu
[2] = Indikator Tertinggi Kedua untuk kota/kabupaten tertentu

3.3 Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

Bobot prioritas untuk masing-masing indikator yang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Bobot Prioritas Indikator-Indikator Sumber Daya Manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator-Indikator Perekonomian Daerah	Bobot Prioritas	Peringkat Relatif
1	2	3
Jumlah penduduk yang bekerja	0,276	1
Tingkat partisipasi siswa	0,193	2
Rasio jumlah pengajar terhadap siswa	0,164	3
Presentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk	0,114	4
Angkatan kerja	0,111	5
Persentase angkatan kerja	0,083	6
Angka ketergantungan	0,051	7
Pengangguran	0,034	8

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten / kota untuk variabel sumber daya manuia dapat dilihat pada Tabel 6. Dari tabel tersebut dapat terlihat

Tabel 6 Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

Peringkat	**Kabupaten/Kota**	**Nilai Indikator Terbobot**								**Jumlah Indikator Terbobot**
		Z1	Z2	Z3	Z4	Z 5	Z	Z	Z 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Kabupaten Konawe	0,014	0,091	0,056	0,041	0,223[1]	0,034	0,162[2]	0,104	0,725
II	Kabupaten Muna	0,050	0,089	0,005	0,021	0,250[1]	0,012	0,148[2]	0,057	0,632
III	Kota Kendari	0,004	0,081	0,063	0,041	0,141[2]	0,019	0,120	0,160[1]	0,629
IV	Kabupaten Kolaka	0,013	0,094	0,055	0,021	0,220[1]	0,010	0,129[2]	0,058	0,600
V	Kabupaten Buton	0,043	0,084	0,012	0,021	0,216[1]	0,011	0,121[2]	0,077	0,585
VI	Kota Bau-Bau	0,016	0,019	0,041	0,041	0,041	0,017	0,151[1]	0,151[1]	0,476
VII	Kabupaten Konawe Selatan	0,022	0,074	0,043	0,041	0,199[1]	0,010	0,003	0,075[2]	0,467
VIII	Kabupaten Kolaka Utara	0,022	0,016	0,081	0,109[1]	0,039	0,012	0,105[2]	0,040	0,423
IX	Kabupaten Bombana	0,029	0,014	0,040	0,101[1]	0,035	0,012	0,080[2]	0,025	0,337
X	Kabupaten Wakatobi	0,027	0,009	0,014	0,101[1]	0,035[2]	0,013	0,019	0,024	0,244
Jumlah										5,118

Sumber: Hasil Analisis, 2007.

Keterangan:

[1] = Indikator Tertinggi Pertama untuk kota/kabupaten tertentu

[2] = Indikator Tertinggi Kedua untuk kota/kabupaten tertentu

3.4 Perbandingan Peringkat Daya Saing Kabupaten/Kota Keseluruhan Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, serta Sumber Daya

Peringkat daya saing kabupaten / kota secara keseluruhan dengan perbandingan antar variabel dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten / Kota	Fungsi Kabupaten / Kota	Peringkat Berdasarkan Variabel			Peringkat Daya Saing Keseluruhan
		Perekonomian Daerah	Infrastruktur & SDA	SDM	
1	2	3	4	5	6
A. Kepulauan					
1. Kabupaten Buton	PKL, Pusat WP IV	I	VIII	V	III
2. Kabupaten Muna	PKL	VIII	V	II	V
3. Kabupaten Bau Bau	PKL, Pusat WP III	VI	IV	VI	VI
4. Kabupaten Wakatobi	PKL	IX	X	X	X
B. Daratan					
1. Kabupaten Konawe	PKL	III	I	I	I
2. Kota Kendari	PKN, Pusat WP I	V	III	III	II
3. Kabupaten Kolaka	PKL, Pusat WP II	X	II	IV	IV
4. Kabupaten Konawe Selatan	PKL	IV	IX	VII	VII
5. Kabupaten Bombana	PKL	II	VI	IX	VIII
6. Kabupaten Kolaka Utara	PKL	VII	VII	VIII	IX

Sumber : Hasil Analisis 2007.
Keterangan : WP = Wilayah Pengembangan

Dari Tabel 7 di atas, secara umum tidak terdapat perbedaan yang jelas bahwa dengan permasalahan akses transportasi darat, kabupaten / kota di daratan akan memiliki tingkat daya saing rendah, walaupun tidak menempati tingkat daya saing terbaik. Hal ini dilihat dari Kabupaten Buton yang menempati daya saing ke III, dengan tingakt perekonomian daerah sebagai tingkat daya saing tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya. Namun secara keseluruhan memang terlihat, bahwa kabupaten dan kota yang terletak di daratan, memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dengan peringat I (Kab. Konawe), II (Kota Kendari), dan IV (Kab. Kolaka). Hal ini menunjukkan kemampuan akses daratan karena ketersediaan infrastruktur, selain penjalaran pertumbuhan ekonomi dengan daerah yang berdekatan, serta daya tarik penduduk untuk tinggal di wilayah daratan; memungkinkan daerah-daerah di daratan mampu dan memiliki daya saing untuk mengembangkan wilayahnya dengan lebih baik.

Selain itu, kabupaten / kota yang menjadi pusat Pengembangan Wilayah (WP) memiliki tingkat daya saing yang lebih baik; seperti Kab. Buton, Kab. Bau Bau, Kota Kendari (sekaligus sebagai PKN), dan Kabupaten Kolaka. Namun ini hal ini tidak berlaku bagi Kabupaten Konawe, walaupun bukan Pusat WP tetapi memiliki tingkat daya saing tertinggi.

4 KESIMPULAN

Tingkat daya saing merupakan sumber bagi perkembangan wilayah dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan fungsi yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, di antaranya sebagai pusat pengembangan wilayah, dan pusat kegiatan nasional dan lokal; daya saing setiap kabupaten / kota akan memberikan kemudahan pelayanan dan penjalaran perkembangan kepada wilayah sekitarnya. Kab. Buton, Kab. Bau Bau, Kota Kendari (sekaligus sebagai PKN), dan Kabupaten Kolaka; yang memiliki fungsi khusus tersebut telah didukung pula oleh daya saing yang cukup baik untuk variabel-variabel yang unggul di masing-masing kabupaten/kota. Peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia pada kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, turut mendukung kabupaten / kota tersebut untuk menjadi peringkat terbaik secara umum. Dengan pengukuran tingkat daya saing di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan wilayah di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alisjahbana, Armida S., dkk. (2002). "*Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*", Yogyakarta, BPFE.
[2] Anonim. The Bulgarian Exercise (BCE). The Bulgarian Competitiveness Initiative. Diakses dari http://www.competitiveness.bg/. Diakses pada tanggal 8 Januari 2007.
[3] Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto., (1999). "*Kota Berkelanjutan*". Bandung.
[4] Institut of Management Development (IMD). World Competitive Yerdbook. New Delhi: Vicas Publishing House Ltd.
[5] Kenyon, Peter & Johnson-Wills, Nick. Perth as an Internationally Competitive City. Future Perth Economy Conference. The Institute for Research into International Competitiveness. Western Australia Planning Commision, Committee for The Economic Development of Australia, Ministry for Planning. Sumber diakses dari http://www.curtin.edu.au.iric. Diakses pada tanggal 8 Januari 2007.
[6] Thomas, Alan. Transport Planning and It's Impact on city competitiveness. 2003. SECTRA, Interministerial Secretariat of Transport Planning. Santiago, Chile. Sumber diakses dari http://www.beaconhill.org. Diakses pada tanggal 8 Januari 2007.
[7] UK-DTI dan Regional Competitiveness Indicators & Centre For Urban and Regional Studies. 1998. Competitiveness Project 1998 and Regional Banchmarking Report.
[8] World Bank Institute. 2001. City Strategy to Reduce Urban Proverty Trough Local Economic Development: City Strategy and Governance, International Bank of Reconstruction and Development.